

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, Timor Timur telah terpecah belah akibat politik *divide et impera*. Pada 1910 terjadi pemberontakan yang dilakukan rakyat Timor Timur sebelum Perang Dunia II, dikenal dengan Perang Manufahi (1910-1912). Pada tanggal 25 April 1974 terjadi Revolusi Bunga di Portugal. Kebijakan dekolonisasi diterapkan di Timor Timur. Tahun 1975 terjadi Perang Saudara, yang dipicu kegagalan dekolonisasi. Akhirnya Portugal meninggalkan Timor Timur. Setelah Portugal meninggalkan Timor Timur, kelompok Fretilin dan kelompok UDT, Apodeti, Trabalhista, dan KOTA saling bersengketa mengenai masa depan Timor Timur, yang berujung pada perang saudara.

Uniao Democratica de Timorese (UDT) yang haluan politiknya merdeka, tetapi tetap menginduk pada Portugal, Frete Revolucionaria de Timor Leste Independente (Fretilin) berhaluan politik merdeka penuh, serta Associacao Social Democratico de Timor (AST) yang kemudian berubah menjadi Associacao Popular Democratico de Timor (Apodeti) dan berhaluan politik integrasi dengan Indonesia.

Situasi kemudian mendorong Timor Timur berintegrasi dengan Republik Indonesia, pada 17 Juli 1976. Menurut seorang tokoh yang terlibat langsung dalam kekacauan perang saudara 1975, tidak ada pilihan yang lebih

baik selain berintegrasi dengan Indonesia. Dan keinginan berintegrasi diterima oleh banyak negara yang berdiri dibelakang Indonesia, termasuk Amerika Serikat dan Australia. Walaupun secara resmi PBB belum mengakui integrasi Timor Timur kedalam Republik Indonesia, dan menanggapi Timor Timur sebagai daerah yang belum berpemerintahan sendiri (*non-selfgoverning territory*), Portugal tetap bersikeras menjadikan Timor Timur sebagai provinsi seberang lautan (*Provincia Ultramarina*). (Makarim, dkk, 2003: 24).

Berdasarkan hal ini maka status Timor Timur tetap menjadi agenda permasalahan setiap tahun di Majelis Umum PBB. Resolusi demi resolusi yang dikeluarkan sejak 1975 sampai 1978 intinya mengutuk tindakan pendudukan dan mendesak diadakannya penentuan nasib sendiri oleh dan untuk rakyat Timor Portugis. Posisi Portugal didukung oleh beberapa bangsa dan negara di forum-forum internasional.

Indonesia memasuki Timor Timur tanggal 7 Desember 1975, melalui operasi seroja. James Dunn, Konsul Australia di Timor Timur 1962-1964, melukiskan awal keterlibatan RI di Timor Timur, bertepatan dengan peringatan 34 tahun serangan Jepang terhadap Pearl Harbour. Indonesia menunda serangan beberapa saat. Serangan baru dimulai pukul 02.00 dini hari waktu setempat. Atau, kurang dari 24 jam, setelah kunjungan singkat Presiden AS Gerald Ford dan Menlu Henry Kissinger ke Indonesia. Penundaan itu dilakukan setelah ada “persetujuan penundaan” RI-AS, untuk

member kesempatan kepada pejabat AS itu, setidaknya untuk tidak merasa dipermalukan. (Kuntari, 2008:33)

Pada awalnya keputusan Indonesia didukung pihak barat dan Jepang. Hal itu setidaknya dipastikan Noam Chomsky, dalam *The Guardian*, London, 7 Mei 1994. Ia menggambarkan persoalan Timor Timur mengutip ucapan Menlu Ali Alatas yang sangat terkenal 1992. Alatas mengatakan bahwa bagi pemerintah, masalah Timor Timur telah menjadi “seperti sebuah kerikil tajam di dalam sepatu”. Chomsky mengakui pihak barat memang tidak mempertajam kerikil itu. Tetapi sebaliknya, barat dan Jepang berada di pihak Indonesia saat memutuskan memasuki Timor Timur. (Kuntari, 2008: 43-44).

Selama Timor Timur berada dalam masa integrasi, Indonesia memberikan sangat banyak jasa baiknya, baik dalam membantu proses dekolonisasi, mengakhiri perang saudara, maupun dalam melaksanakan pembangunan wilayah. Jatuhnya pemerintahan orde baru ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai akibat gerakan reformasi membuka penyelesaian baru bagi Timor Timur. Habibie selaku Wakil Presiden menggantikan Soeharto sebagai Presiden. Hal ini membuka babak baru bagi Timor Timur.

Setelah pemerintahan Indonesia berganti hubungan luar negeri dengan Australia pun berubah. Perdana Menteri Australia pun berganti dari Paul Keating kepada John Howard, kebijakan tentang Timor Timur pun berubah.

Ia secara langsung mengirim surat kepada Habibie atas keinginannya memberi referendum bagi kemerdekaan Timor Leste. (Fitriani, 2012 : 115)

Masalah Timor Leste tidak pernah tuntas. Masalah ini menjadi “kerikil dalam sepatu” sebagai mana dikatakan Menteri Luar negeri Indonesia, Ali Alatas, pada waktu itu, karena masih adanya gerakan perlawanan yang intensif di Timor Leste, terutama semenjak decade 1980-an di Jawa dan di beberapa negara diluar negeri sehingga masalah Timor Leste semakin aktual dan luas jangkauan politiknya. Melihat keadaan politik yang tidak menguntungkan Indonesia, maka setelah jatuhnya Presiden Soeharto dan berakhirnya orde baru, Presiden Habibie menawarkan dua opsi untuk Timor Leste. (Coelho, 2012: 85).

Jika mayoritas memilih status otonomi khusus Timor Timur akan tetap menjadi bagian integral Republik Indonesia. Sebaliknya jika penawaran otonomi khusus ditolak, Timor Timur akan berpisah secara terhormat dari Indonesia, dan dapat segera mengambil langkah-langkah yang perlu untuk dikembalikan kepada PBB. Dengan dikeluarkannya dua opsi tersebut pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah tidak keberatan untuk melepaskan wilayah Timor Timur, jika memang itu yang dikehendaki rakyat Timor Timur. Namun dalam hal ini bagi kelompok pro integrasi opsi tersebut seakan-akan pemerintah Indonesia meninggalkan mereka yang telah berjuang mempertahankan integrasi. Sedangkan bagi pro kemerdekaan hal ini merupakan kesempatan emas untuk mencapai kemerdekaan seperti yang diharapkan.

Pelaksanaan jajak pendapat diserahkan kepada PBB, yang akan menanganinya langsung melalui misi yang dibentuk PBB di Timor Timur, yakni UNAMET. Keterlibatan PBB lewat UNAMET merupakan buah pembicaraan segitiga (*tripartite*) selama beberapa tahun, yang melibatkan Indonesia, Portugal, dan Sekjen PBB. (Makarim, dkk, 2003: 24).

Dari latar belakang inilah peneliti tertarik untuk meneliti **Faktor-faktor Lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1999.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia
2. Faktor-faktor lepasnya Timor Timur dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1999

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah, adapun masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah “Faktor-faktor lepasnya Timor Timur dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1999”

1.4 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini, yakni

1. Apa yang melatarbelakangi sehingga Timor Timur lepas dari Negara Indonesia?
2. Bagaimana sikap masyarakat Timor Timur tentang referendum?

3. Apakah yang menjadi faktor-faktor lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang lepasnya Timor Timur dari Negara Indonesia
2. Untuk mengetahui sikap masyarakat Timor Timur tentang referendum
3. Untuk mengetahui faktor-faktor lepasnya Timor Timur dari NKRI

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yakni

1. Memberi informasi yang jelas dan objektif kepada pembaca untuk mengambil hikmah dari lepasnya Timor Timur dari Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Timor Timur lepas dari Indonesia.
3. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang lepasnya Timor Timur dari Indonesia kepada pembaca.